

AKSELERASI PROGRAM EDUKASI KEUANGAN MELALUI KOLABORASI BANK INDONESIA, LEMBAGA KEUANGAN, DAN PERGURUAN TINGGI

I Wayan Nuka Lantara

*Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Email: waynuk@gmail.com*

Ni Ketut Rai Kartini

*Mahasiswa Program Magister Sains Psikologi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,
Email: dikrey@yahoo.com*

Abstract

This study aims to investigate the possibility of acceleration of financial education programs in Indonesia, through the collaboration of the three main parties, namely: (1) the regulator (Central Bank/Financial Services Authority); (2) the practitioner (financial institutions); and (3) the academia (universities). The study employed a qualitative approach to assess the opinions of the stakeholders in the Gadjah Mada University and related financial practitioners regarding accelerated implementation of financial education programs in Indonesia, which involved interviews with 24 informants who were considered to have knowledge about the financial education program in Indonesia. The study concluded that the respondents showed a positive perception on the importance and benefits of financial education programs in Indonesia. Other findings depicted that financial education programs need to be directed at the entire community with a wider coverage range. To expedite the process, a solid collaboration needs to be made between the three main parties: (1) Central Bank/ Financial Services Authority as regulator; (2) financial institutions (practitioners and providers of financial products and services); and (3) academia (universities). In terms of the implementation of the proposed program, the collaboration of all three parties need to be directed to the selected students who will firstly be prepared to be a financial educator (by giving knowledge, education and mentoring). Selected and well-trained students are expected to be effective educator who has energy resource availability in large quantities and a more mobile and larger coverage to accelerate financial education program in Indonesia.

Keywords: *literacy, education, financial inclusion*

PENDAHULUAN

Krisis finansial yang pernah terjadi di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia, serta banyaknya kasus penipuan investasi di Indonesia membawa pelajaran berharga atas tiga aspek penting, yaitu: (1) pentingnya informasi keuangan yang lebih jujur dan terbuka; (2) perlunya pengawasan yang lebih ketat atas lembaga keuangan dan investasi yang beroperasi di Indonesia; dan (3) pentingnya program edukasi keuangan untuk meningkatkan tingkat literasi

keuangan yang akan sangat berguna bagi masyarakat dalam mencerna informasi dan dalam pengambilan keputusan keuangan yang lebih bijak dan rasional.

William (2007) menyatakan bahwa literasi keuangan telah menjadi isu penting tidak hanya bagi para pejabat di bidang bisnis (seperti dewan direksi), tetapi juga untuk pemegang saham dan para *stakeholders* (seperti pelanggan, karyawan, dan masyarakat umum). Tingkat literasi

keuangan yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan tata kelola perusahaan dan meminimalkan dampak negatif dari krisis keuangan yang bisa saja terjadi lagi di kemudian hari.

Fluch (2007) juga berpendapat bahwa program edukasi keuangan untuk tujuan meningkatkan literasi keuangan masyarakat yang dilakukan oleh bank sentral di berbagai negara di dunia pada dasarnya merupakan investasi dalam bentuk pengetahuan (*investment in knowledge*) yang kelak akan bermanfaat bagi kemajuan ekonomi suatu negara. Stark (2006) menyatakan bahwa program edukasi keuangan yang dilakukan oleh bank sentral di berbagai negara pada hakekatnya hanya merupakan pelengkap (*complement*) saja dari pelajaran keuangan yang umumnya diberikan di bangku sekolah (universitas).

OECD (2005) dan OJK (2013) dalam laporannya menyimpulkan bahwa tingkat literasi keuangan yang masih rendah bisa ditingkatkan melalui program edukasi keuangan untuk memberikan pengetahuan dan kesadaran bagi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang cerdas dan bijak. Dalam kenyataannya, selama ini program edukasi keuangan di Indonesia sudah dilakukan melalui inisiatif Bank Indonesia (OJK) dan bekerjasama dengan lembaga keuangan, tapi masih cenderung bersifat insidental dan belum mampu menjangkau sebaran geografis maupun sasaran subyek yang luas. Dengan demikian, perlu dipikirkan cara untuk mempercepat (akselerasi) program edukasi keuangan di Indonesia dengan melibatkan partisipan yang lebih banyak sehingga daya jangkau geografisnyapun menjadi lebih luas.

Tulisan ini bertujuan untuk melakukan kajian atas kemungkinan akselerasi program edukasi keuangan di Indonesia yang selama ini dirasa belum maksimal dan belum menjangkau seluruh komponen masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, melalui kolaborasi tiga pihak utama, yaitu: (1) pihak regulator (Bank Indonesia/OJK); (2) pihak praktisi (lembaga-lembaga keuangan); dan

(3) pihak akademisi (perguruan tinggi). Dalam tataran pelaksanaannya, ketiga pihak tersebut perlu memberikan pembekalan, pendidikan dan pendampingan bagi mahasiswa, dan selanjutnya bisa diberdayakan sebagai tenaga penyuluh dalam program edukasi keuangan dengan kuantitas yang besar dan daya jangkau geografis yang jauh lebih luas.

Ide dasar dari penulisan makalah ini adalah bahwa untuk mengakselerasi program edukasi keuangan di Indonesia tidak cukup jika hanya dilakukan oleh Bank Indonesia (OJK) dan lembaga keuangan saja, tapi juga perlu berkolaborasi dengan perguruan tinggi. Kolaborasi antara ketiga komponen utama tersebut sebaiknya diarahkan kepada mahasiswa yang diasumsikan sebagai bagian dari masyarakat yang sudah menjalani jenjang pendidikan tertinggi, lalu diseleksi, dididik dan didampingi sehingga literasi keuangan mereka meningkat. Mahasiswa yang telah dididik terlebih dahulu tersebut nantinya diharapkan akan siap menjadi para penyuluh (sukarelawan) yang enerjik, kreatif dan sekaligus menjadi agen perubahan dan model peran (*role model*) tidak saja bagi lingkungan rekan-rekan mereka di kampus, tapi juga pada jangkauan yang lebih luas dan mengena yaitu pada masyarakat di sekitar tempat tinggal (asrama/kos-kosan), lingkungan keluarga di kampung halaman, maupun lingkungan masyarakat dimana mahasiswa ditugaskan (terlibat) dalam program edukasi keuangan.

Untuk mendukung ide tersebut, terlebih dahulu diperlukan bukti-bukti empiris yang terkait dengan bagaimana pendapat dari para *stakeholder* di perguruan tinggi dan pelaku keuangan tentang berbagai hal yang terkait dengan arti penting dan teknis pelaksanaan program edukasi keuangan yang melibatkan kolaborasi Bank Indonesia (OJK), lembaga keuangan, dan perguruan tinggi. Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pola program akselerasi keuangan yang ideal untuk diterapkan melalui kolaborasi Bank Indonesia (OJK), lembaga-lembaga keuangan, dan perguruan tinggi, dengan melibatkan mahasiswa sebagai

kekuatan terdepan yang terlebih dahulu diseleksi dan dipersiapkan untuk menjadi penyuluh dalam program edukasi keuangan. Isu ketiga ini dilakukan dengan menganalisis pola jawaban dari para narasumber yang diwawancarai terkait arti penting dan teknis pelaksanaan akselerasi program edukasi keuangan di Indonesia.

Beberapa penelitian survey tentang tingkat literasi keuangan telah dilakukan di berbagai negara. Beberapa diantaranya adalah: Chen and Volpe (1998), Volpe et al. (2002), dan Rosacker et al. (2009) untuk kasus di Amerika; Marriot (2007) di Inggris (UK); OECD (2005) pada 12 negara berbeda (Amerika, Inggris, Australia, Jepang dan beberapa negara Eropa); ACNielsen Research (2005), Beal dan Delpachitra (2003) di Australia; Al-Tamimi dan Kalli (2009) di Arab (UAE), serta Bönthe and Filipiak (2012) untuk kasus di India. Untuk kasus di Indonesia, penelitian oleh World Bank (2010) dan OJK (2013) pernah dilakukan dengan mengambil responden masyarakat secara umum.

Meskipun sudah cukup banyak penelitian tentang literasi keuangan telah dilakukan, tapi sebagian besar dilakukan di negara-negara maju. Dengan demikian, penelitian ini masih perlu kiranya dilakukan untuk memberi bukti empiris dari Indonesia dan melibatkan responden mahasiswa yang diasumsikan sebagai bagian masyarakat yang sedang mengenyam level pendidikan tertinggi. Hasil penelitian ini juga relevan terutama jika dikaitkan dengan ide utama dalam tulisan ini yang mencoba menyelidiki peluang dilakukannya kolaborasi antara Bank Indonesia (OJK), lembaga-lembaga keuangan, dan perguruan tinggi untuk mengakselerasi dan memperluas jangkauan program edukasi keuangan di Indonesia.

Peluang akselerasi program edukasi keuangan melalui kolaborasi Bank Indonesia (OJK), lembaga-lembaga keuangan, dan perguruan tinggi masih sangat terbuka mengingat banyaknya perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia, yang merupakan sumber daya yang sangat efektif dan tersedia dalam kuantitas yang besar. Berdasarkan data

Dikti (2014), saat ini jumlah perguruan tinggi yang terdaftar dan beroperasi di Indonesia mencapai 142 perguruan tinggi negeri (universitas, sekolah tinggi, akademi, politeknik); dan 3.078 perguruan tinggi swasta (PTS), dengan total mahasiswa berjumlah mahasiswa lebih dari 5 juta orang. Sementara itu terdapat juga 52 perguruan tinggi agama Islam negeri (PTAIN) dan 272 perguruan tinggi agama Islam swasta (PTAIS) di Indonesia. Jika mahasiswa yang terpilih dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia bisa dibekali, dididik dan didampingi melalui kolaborasi BI/OJK, praktisi lembaga keuangan, dan para akademisi di perguruan tinggi, maka mahasiswa pilihan tersebut akan menjadi sumber daya edukator yang enerjik, kreatif, mempunyai fleksibilitas waktu yang lebih tinggi, dan daya jangkauan geografis yang lebih luas.

Disamping itu, mahasiswa pilihan yang telah dibekali dan didampingi dengan pengetahuan tentang keuangan, setelah menyelesaikan perannya sebagai edukator (penyuluh) dalam program edukasi keuangan akan bisa diasah lebih lanjut dan diharapkan akan menjadi calon tenaga profesional di bidang keuangan, untuk memenuhi permintaan atas sumber daya profesional di bidang keuangan yang terus meningkat, seiring dengan perkembangan produk-produk dan perkembangan bisnis lembaga keuangan di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Edukasi keuangan, literasi keuangan, dan kemakmuran masyarakat

Definisi program edukasi keuangan yang dikemukakan oleh OECD (2005) adalah "suatu proses dimana pengetahuan konsumen keuangan (investor) atas berbagai produk keuangan, konsep risiko dan return, bisa ditingkatkan melalui pemberian informasi, instruksi, saran, sehingga kecakapan dan rasa percaya diri mereka akan lebih tinggi dalam membuat keputusan keuangan secara lebih bijak".

Program edukasi keuangan diharapkan bisa meningkatkan literasi keuangan masyarakat

yang diindikasikan oleh pengetahuan dan kecerdasan masyarakat untuk mengelola uang secara lebih bijak (Xu dan Zia, 2012). Program edukasi keuangan bisa bermanfaat bagi masyarakat pada berbagai usia maupun tingkat pendapatan (OECD, 2005). Sebagai contoh, program edukasi akan bisa memberikan pengetahuan dan kesadaran bagi masyarakat tentang pentingnya hidup hemat dan menyetor (menabung) pendapatan secara rutin sebagai persiapan untuk biaya sekolah anak jika sudah beranjak dewasa atau mempersiapkan masa pensiunnya. Program edukasi keuangan juga diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan berbagai alternatif akses sumber dana pinjaman yang tersedia selain sumber informal (*rentenir*) yang berbunga sangat tinggi. Program edukasi keuangan juga bisa berguna untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam berinvestasi dengan selalu memperhatikan tingkat return dan risiko serta aspek legalitas dari berbagai alternatif investasi yang tersedia di pasar keuangan.

Disamping itu, Apostoiaie (2010) juga berpendapat bahwa program edukasi keuangan akan mampu meningkatkan literasi keuangan masyarakat yang diindikasikan oleh tiga komponen utama: (1) pengetahuan (*knowledge*); (2) kemampuan analisis (*analytical skills*); dan (3) akses informasi (*access to information*) sehingga lebih efektif dalam mengambil keputusan keuangan.

Gnan et al. (2007) mengemukakan bahwa program edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat tidak saja akan memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum, tapi juga penting bagi kestabilan sistem keuangan suatu negara. Secara spesifik, terdapat lima alasan mengapa program edukasi keuangan sangat penting dilakukan: (1) untuk meningkatkan efektivitas dari kebijakan moneter; (2) memastikan fungsi kerja pasar keuangan berjalan lancar; (3) mendukung kebijakan ekonomi yang berkelanjutan; (4) mendorong literasi keuangan sebagai barang publik (*public*

good), serta (5) membangun reputasi positif bank sentral di mata masyarakat sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat akan lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat.

OECD (2005) menyebutkan ada lima alasan mengapa program edukasi keuangan menjadi semakin penting dilakukan, yaitu: (1) kompleksitas produk-produk keuangan yang semakin beragam dan kompleks; (2) peningkatan jumlah produk keuangan yang tersedia di pasar keuangan; (3) perubahan pola populasi penduduk dengan tingkat harapan hidup (*life expectancy*) yang makin tinggi tapi tidak diiringi dengan pertumbuhan penduduk muda (*delayed childbearing and fewer children*); (4) perubahan skema sistem dana pensiun yang sebelumnya bersifat manfaat yang diberikan (*benefit*) berubah menjadi kontribusi (*contribution*); dan (5) masih rendahnya tingkat literasi keuangan. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa ketika tingkat literasi keuangan masyarakat masih rendah, maka untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, program edukasi keuangan adalah alternatif yang sangat mungkin dilakukan.

Untuk konteks di Indonesia, dalam laporan tahunan OJK (2013) dijelaskan secara singkat bahwa salah satu strategi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan literasi keuangan adalah melalui program edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan. Program edukasi keuangan juga perlu dilakukan dengan menggandeng *stakeholders*, sebagaimana terlihat dalam Gambar 1.

2. Teori tentang proses informasi dan edukasi keuangan

Dalam literatur psikologi pendidikan, proses edukasi bisa dijelaskan dengan teori proses informasi berdasarkan model Atkinson-Shiffrin (1968) – (dalam Slavin, 2012). Proses informasi yang diterima manusia sebagai bagian dari proses pembelajaran dianalogikan seperti proses yang terjadi pada komputer. Dalam teori proses informasi, informasi yang diterima akan diperlakukan sebagai masukan (*input*), lalu akan diproses (*processing*) dengan suatu cara tertentu,

Gambar 1. Strategi Nasional Literasi Keuangan (SNLK)

Sumber: Laporan Tahunan OJK (2013), halaman 64

dan selanjutnya disimpan dalam memori yang diharapkan berguna nantinya dalam membuat keputusan atau melakukan suatu tindakan atas informasi tersebut (*output*). Dengan kata lain, proses informasi yang dilakukan manusia terdiri dari tahapan menerima stimulus berupa informasi, menyimpan dalam memori, dan mengingat kembali jika informasi tersebut dibutuhkan.

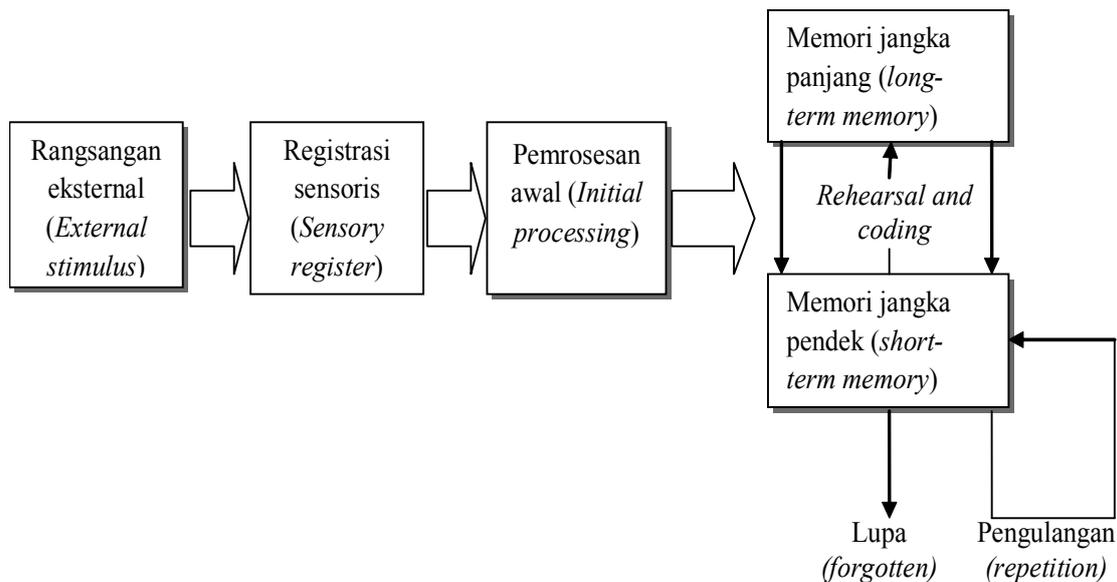
Inti dari teori proses informasi adalah menjelaskan bagaimana informasi dari lingkungan disimpan dalam memori. Pada model tersebut memori manusia disusun dalam tiga kotak penyimpanan. Informasi baru akan diperlakukan sebagai rangsangan (*stimulus*) dari lingkungan melalui kotak pertama yakni *sensory store*, kemudian masuk ke dalam memori jangka pendek (*short-term memory*), dan akhirnya akan berakhir dalam tahap memori jangka panjang (*long-term memory*). Teori proses informasi memiliki asumsi bahwa memori jangka panjang memiliki kapasitas yang tak terbatas dibandingkan dengan *short-term memory*. Teori proses informasi berdasarkan model Atkinson-Shiffrin bisa diilustrasikan seperti dalam Gambar 2.

Pengetahuan yang diperoleh melalui proses belajar terjadi jika informasi tersimpan pada

memori jangka panjang. Transfer informasi terjadi melalui proses penyebaran dan pengaktifan pada memori yakni informasi baru yang dihubungkan dengan informasi yang lain yang sebelumnya telah tersimpan. Hal yang terpenting adalah seberapa jumlah informasi yang telah ada pada *long term memory* sehingga saat informasi baru masuk maka terjadi pengaktifan pada memori untuk memanggil informasi yang lama yang terhubung dengan informasi baru. Dengan kata lain, proses edukasi dilakukan melalui proses membandingkan informasi yang diterima dengan pengetahuan yang telah ada dalam memori seseorang, dan selanjutnya akan membangun pemahaman terhadap pengetahuan baru.

Dalam konteks program edukasi keuangan, informasi baru yang disampaikan kepada subyek yang menjadi sasaran program edukasi keuangan, diharapkan akan bisa disimpan tidak saja hanya dalam memori jangka pendek, tapi juga memori jangka panjang, sehingga akan berguna sebagai pengetahuan yang kelak akan berguna bagi subyek bersangkutan sehingga menjadi lebih bijak dan cerdas pada saat mengambil keputusan dalam pengelolaan keuangan pribadi.

Gambar 2. Urutan dalam proses informasi (Model Atkinson-Shiffrin)



Sumber: Slavin, R.E. (2012), "Educational Psychology: Theory and Practice", 10th-ed, halaman 145.

3. Penelitian empiris sebelumnya

Literasi keuangan secara sederhana bisa diartikan sebagai tingkat pengetahuan seseorang tentang tata cara mengatur keuangan pribadi (keluarga) secara cerdas dan bijak. Literasi keuangan tidak saja hanya bermanfaat bagi seseorang ketika yang bersangkutan harus membuat keputusan investasi pada berbagai alternatif investasi (deposito, reksadana, obligasi ataupun saham), tapi juga untuk pengelolaan keuangan sehari-hari. Seorang yang mempunyai tingkat literasi keuangan yang baik, akan cenderung untuk menjadi lebih bijak dan cerdas mengelola uang masuk dan uang keluar. Sebagai contoh adalah kemampuan untuk membuat anggaran pengeluaran rutin bulanan untuk membayar tagihan listrik, telpon, kartu kredit, belanja bulanan dan lainnya. Kemampuan lainnya adalah berusaha untuk menyisihkan pendapatan bulanan untuk ditabung atau diinvestasikan (setelah dikurangi dengan rencana pengeluaran bulanan). Contoh lainnya adalah mampu membuat rencana dan mengukur kemampuan keuangan pribadi untuk membayar tagihan angsuran kredit kendaraan bermotor (mobil).

Pada dasarnya, ada beberapa versi definisi tentang literasi keuangan. Salah satu yang banyak diacu adalah definisi menurut OECD (2012), yang mendefinisikan literasi keuangan sebagai kombinasi dari kesadaran (*awareness*), pengetahuan (*knowledge*), kecakapan (*skill*), sikap (*attitude*), dan perilaku (*behavior*) dalam membuat keputusan investasi yang baik (*sound financial decisions*) dan mampu mencapai tujuan keuangan pribadi. Dalam paper OECD (2012) tersebut dijelaskan juga bahwa literasi keuangan paling tidak akan terkait dengan tiga elemen utama, yaitu: (1) pengetahuan keuangan (*financial knowledge*); (2) sikap dan perilaku keuangan (*financial behavior and financial attitude*); dan (3) pilihan produk keuangan (*financial product choice*).

Remund (2010) mencoba untuk merangkum dan mengklasifikasikan berbagai definisi literasi keuangan yang sudah pernah dirumuskan oleh para ahli sebelumnya kedalam lima kategori utama literasi keuangan, yaitu: (1) pengetahuan akan konsep-konsep keuangan (*knowledge of financial concepts*); (2) kemampuan untuk mengkomunikasikan konsep-konsep keuangan (*ability to communicate financial concepts*);

(3) bakat atau kecerdasan dalam mengelola keuangan personal (*aptitude in managing personal finances*); (4) kecakapan dalam membuat keputusan keuangan yang tepat (*skill in making appropriate financial decisions*); dan (5) rasa percaya diri dalam perencanaan kebutuhan keuangan masa depan yang efektif (*confidence in planning effectively for future financial needs*).

Secara empiris, beberapa penelitian survey pernah dilakukan untuk mengukur tingkat literasi keuangan di berbagai negara. Sebagai contoh, Chen and Volpe (1998) melakukan survey terhadap 924 mahasiswa perguruan tinggi dari 13 kampus di Amerika. Hasil temuan mereka adalah tingkat literasi keuangan responden di Amerika sebesar 52.87%, dengan nilai median 55.56%. Hasil penelitian mereka juga menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat literasi keuangan dari para responden jika ditinjau dari faktor demografis, seperti: disiplin ilmu yang ditekuni; tahun angkatan; jenis kelamin, maupun lama waktu pengalaman kerja.

Selanjutnya, Volpe et al. (2002) telah melakukan survey terhadap 530 investor *online* di Amerika untuk mengukur tingkat literasi para investor dan sekaligus untuk menguji faktor-faktor yang menjadi determinan literasi keuangan. Temuan mereka menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik atas skor literasi keuangan dari berbagai kelompok responden ditinjau dari: tingkat pendidikan; lama waktu pengalaman kerja; usia; pendapatan; dan jenis kelamin.

Penelitian lainnya pernah dilakukan oleh Marriot (2007) di Inggris (UK) dengan melakukan survey terhadap mahasiswa perguruan tinggi di Inggris. Temuan mereka mendukung temuan Chen and Volpe (1998) di Amerika bahwa tingkat literasi keuangan mahasiswa di Inggris tidak jauh berbeda dengan temuan di Amerika. Penelitian tersebut juga menemukan kaitan antara faktor-faktor demografis (jenis kelamin; usia; disiplin ilmu; jenjang pendidikan; dan lama waktu pengalaman kerja) dengan tingkat literasi.

Penelitian survey tentang tingkat literasi keuangan yang melibatkan responden pada 12 negara berbeda (Amerika, Inggris, Australia, Jepang dan beberapa negara Eropa) pernah dilakukan oleh OECD (2005). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa secara rata-rata tingkat literasi keuangan di 12 negara yang menjadi sampel tergolong masih rendah di hampir semua negara yang menjadi sampel penelitian.

Untuk kasus di Australia, ACNielsen Research (2005) melakukan survey nasional untuk mengukur tingkat literasi keuangan dan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa tingkat literasi keuangan di Australia mengalami peningkatan dibanding periode pengukuran sebelumnya. Disamping itu, penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh pada tingkat literasi keuangan adalah tingkat pendidikan, kecakapan bekerja, pendapatan, status perkawinan, dan usia.

Penelitian survey yang dilakukan oleh Beal dan Delpachitra (2003) terhadap mahasiswa di University of Southern Queensland (USQ), menemukan bahwa tingkat literasi keuangan mahasiswa semester pertama masih relatif rendah. Penelitian mereka juga menemukan bahwa mahasiswa fakultas bisnis cenderung memiliki tingkat literasi keuangan yang lebih tinggi dibanding mahasiswa fakultas non-bisnis. Disamping itu, mereka juga menemukan bahwa faktor tingkat pendapatan dan pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap tingkat literasi keuangan mahasiswa.

Al-Tamimi dan Kalli (2009) pernah melakukan penelitian survey terhadap para investor individual yang berinvestasi di pasar modal di negara Arab (UEA). Temuan mereka menyimpulkan bahwa tingkat literasi keuangan yang dimiliki para investor yang menjadi responden penelitian masih jauh di bawah tingkat literasi keuangan yang ideal. Mereka juga menemukan bahwa tingkat literasi keuangan dipengaruhi oleh faktor tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan aktivitas di lingkungan kerja.

Penelitian Rosacker et al. (2009) melakukan survey terhadap 41 mahasiswa baru sekolah bisnis di Amerika yang baru saja memperoleh pelatihan literasi keuangan. Hasil temuan mereka menyimpulkan bahwa pelatihan literasi keuangan yang diberikan kepada para responden sangat bermanfaat untuk meningkatkan literasi keuangan responden.

Penelitian lainnya juga pernah dilakukan oleh Bönnte and Filipiak(2012) yang mengambil responden masyarakat umum yang tinggal dan hidup di beberapa desa di India. Penelitian mereka sangat menarik karena mengkaitkan tingkat literasi keuangan dengan pola interaksi sosial dan kasta para responden. Temuan mereka adalah bahwa pola interaksi sosial yang baik di masyarakat berpengaruh positif terhadap tingkat literasi keuangan. Temuan menarik lainnya adalah bahwa responden yang tinggal dan hidup di daerah yang mayoritas berkasta rendah cenderung memiliki tingkat literasi yang rendah, karena keterbatasan akses mereka terhadap produk-produk lembaga keuangan.

METODA PENELITIAN

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yang dilakukan melalui analisis atas informasi yang dikumpulkan dari hasil wawancara (*interview*) kepada beberapa orang narasumber (*informan*) terpilih, dan selanjutnya dilakukan kodifikasi (*coding*) atas hasil wawancara yang telah dikumpulkan untuk memperoleh suatu pola informasi (kesimpulan) atas masalah yang ingin diteliti.

2. Populasi, sampel, dan data penelitian

Data yang digunakan untuk pendekatan kualitatif dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara terhadap narasumber yang dianggap mewakili karakteristik narasumber yang diasumsikan memahami aktivitas edukasi keuangan di Indonesia. Dalam penelitian ini, narasumber yang diwawancarai terdiri dari total 24 orang dengan rincian sebagaimana dalam tabel 2 berikut:

Tabel 1. Distribusi kelompok narasumber

Kelompok narasumber	Afiliasi narasumber	Jumlah narasumber
1	Pejabat Dekanat FEB UGM	1
2	Dosen Konsentrasi Keuangan, Jurusan Manajemen FEB UGM	3
3	Ketua dan anggota <i>Youth Finance Indonesia</i> FEB UGM	4
4	Ketua dan anggota <i>Gadjah Mada Investment Club</i> FEB UGM	4
5	Mahasiswa FEB UGM biasa (yang tidak terafiliasi dalam kelompok mahasiswa minat keuangan)	10
6	Praktisi lembaga keuangan (bank dan lembaga pembiayaan)	2
TOTAL NARASUMBER		24

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara terhadap para narasumber dalam penelitian ini diarahkan pada pendapat (persepsi) para narasumber atas beberapa hal yang terkait dengan program edukasi keuangan di Indonesia seperti: (1) arti penting dan manfaat dilakukannya edukasi keuangan di Indonesia; (2) siapa saja yang perlu disasar oleh program edukasi keuangan; (3) bentuk dan metoda edukasi keuangan yang diterapkan; (4) peran mahasiswa dalam program edukasi keuangan; (5) bentuk dan sumber dukungan yang diharapkan para mahasiswa dalam program edukasi keuangan; (6) evaluasi dan tindak lanjut atas proses dan hasil program edukasi keuangan.

Semua informasi yang diperoleh dari para narasumber selanjutnya dikodifikasi (*coding*) untuk menemukan pola informasi dari para narasumber atas masing-masing pertanyaan yang diajukan. Hasil kodifikasi selanjutnya disusun dalam bentuk tabel jawaban narasumber sebagaimana ditampilkan dalam Lampiran 1.

HASIL PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengkodifikasi (*coding*) pola informasi yang diperoleh dari hasil

wawancara terhadap narasumber (*informan*) yang dianggap mewakili karakteristik narasumber yang diasumsikan memahami program edukasi keuangan di Indonesia. Dalam penelitian ini, narasumber yang diwawancarai terdiri dari total 24 orang narasumber yang mewakili kelompok: pejabat dekanat; dosen jurusan manajemen (minat keuangan); mahasiswa FEB minat keuangan; mahasiswa FEB minat non-keuangan; dan praktisi lembaga keuangan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara terhadap para narasumber dalam penelitian ini diarahkan pada pendapat (persepsi) para narasumber atas beberapa hal yang terkait dengan program edukasi keuangan di Indonesia seperti: (1) arti penting dan manfaat dilakukannya edukasi keuangan di Indonesia; (2) siapa saja yang perlu disasar oleh program edukasi keuangan; (3) bentuk dan metoda edukasi keuangan yang diterapkan; (4) peran mahasiswa dalam program edukasi keuangan; (5) bentuk dan sumber dukungan yang diharapkan para mahasiswa dalam program edukasi keuangan; (6) evaluasi dan tindak lanjut atas proses dan hasil program edukasi keuangan.

1. Arti penting dan manfaat program edukasi keuangan di Indonesia

Pertanyaan pertama yang diajukan kepada responden dalam proses wawancara adalah “apa arti penting dan manfaat dilakukannya program edukasi keuangan di Indonesia?” Sebagaimana juga bisa dilihat dalam Lampiran 1 penelitian ini, semua responden sepakat bahwa program edukasi keuangan sangat penting dilakukan di Indonesia dan akan memberikan manfaat baik bagi individu yang terlibat dalam program tersebut, maupun manfaat dalam konteks perekonomian secara makro.

Pendapat narasumber pejabat dekanat FEB UGM ketika diwawancarai juga menyoroti pentingnya dan manfaat program edukasi keuangan di Indonesia:

“Menurut saya ya....program edukasi keuangan di Indonesia itu sangat penting dan bermanfaat positif. Kualitas SDM akan bisa ditingkatkan sebagai salah satu necessary

condition untuk mengakselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Indonesia...Perlu disadari bahwa di masyarakat kita masih ada gap dalam artian tingkat kemajuan maupun gap psikologis antara berbagai masyarakat di daerah yang maju dan tertinggal.....Perbaikan kualitas SDM diharapkan akan mengurangi ketimpangan ekonomi antara masyarakat perkotaan dan pedesaan, dan mempercepat pertumbuhan perekonomian di daerah. Disamping itu, kasus-kasus penipuan investasi ‘bodong’ yang selama ini banyak terjadi akan bisa dikurangi, karena masyarakat akan semakin financially literated.”

Sementara itu, informasi yang diperoleh dari berbagai narasumber yang diwawancarai juga menyoroti pentingnya dan manfaat positif yang bisa diperoleh dari akselerasi program edukasi keuangan. Beberapa narasumber yang juga menjadi dosen jurusan manajemen (minat keuangan) menyoroti bahwa akselerasi program edukasi keuangan juga diharapkan akan mempercepat inklusi keuangan masyarakat Indonesia yang saat ini masih relatif rendah, yang diindikasikan nantinya dengan semakin banyaknya bagian dari masyarakat Indonesia yang mengakses produk atau layanan yang disediakan oleh lembaga-lembaga keuangan. Berikut kutipan wawancara yang dilakukan terhadap salah satu narasumber dosen manajemen (minat keuangan) FEB UGM:

“Saya kira...akan ada korelasi positif antara kesuksesan dalam mengakselerasi program edukasi keuangan dengan financial literacy dan financial inclusion. Logikanya gini...jika masyarakat semakin well literated, mereka akan semakin mampu untuk mengelola kekayaannya...dan juga semakin aware dengan berbagai produk dan layanan keuangan yang bisa memberi manfaat tambahan bagi mereka.....Jika tingkat inklusi keuangan meningkat, maka peluang masyarakat untuk memperluas usahanya, atau berinvestasi akan meningkat. Selanjutnya, kesejahteraan mereka juga akan bisa ditingkatkan.”

Pendapat yang senada juga diperoleh dari beberapa orang narasumber mahasiswa FEB UGM yang menekuni bidang minat keuangan dan bahkan selama ini bergabung secara aktif dalam kegiatan diskusi dan edukasi keuangan sukarela (FEB UGM *Youth Financial Club* dan Gadjah Mada *Investment Club*). Secara garis besar, para narasumber tersebut juga sependapat bahwa program edukasi keuangan sangat penting dan bermanfaat, karena dengan program edukasi keuangan yang jangkauannya diperluas dan dipercepat (*accelerated*) diharapkan akan mampu memberikan bekal bagi masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan personal mereka. Selanjutnya, masyarakat diharapkan menjadi lebih sejahtera, mencapai kebebasan finansial, dan berimbas positif bagi perkembangan pasar modal Indonesia sebagai alternatif investasi bagi masyarakat.

Beberapa poin penting lainnya yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap narasumber mahasiswa FEB UGM dengan minat studi non-keuangan dan narasumber dari praktisi lembaga keuangan adalah sebagai berikut:

- Program edukasi keuangan sangat penting dan perlu dipercepat dan diperluas jangkauannya mengingat masih banyak bagian dari masyarakat Indonesia yang belum mengerti bagaimana mengelola keuangan pribadi (keluarga) dengan baik. Masyarakat perlu diberi bekal pengetahuan bagaimana mengatur pola konsumsi dan aliran kas masuk maupun kas keluar.
- Program edukasi keuangan sangat penting untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat yang nantinya akan berimbas positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Program edukasi keuangan diharapkan mampu memberikan pengertian dan pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat tentang berbagai produk dan jasa lembaga keuangan, serta pemahaman yang lebih baik dalam menyikapi peran regulator dan pengguna jasa keuangan.

- Program edukasi keuangan diharapkan bisa membuat masyarakat menjadi lebih melek finansial dan menghindarkan mereka dari jebakan kasus alternatif investasi bodong yang masih sering terjadi.
- Program edukasi keuangan diharapkan mampu mengurangi ketimpangan ekonomi dan mampu meningkatkan kecerdasan keuangan masyarakat.

2. Siapa saja yang perlu disasar oleh program edukasi keuangan?

Pertanyaan kedua yang diajukan kepada para responden adalah “siapa saja yang perlu disasar dalam program edukasi keuangan di Indonesia?” Dari berbagai jawaban yang diperoleh dari proses wawancara, pola informasi yang diperoleh bisa disarikan sebagai berikut:

- Semua masyarakat Indonesia sebaiknya dijangkau dalam program edukasi keuangan di Indonesia. Dari sudut pandang tingkat pendidikan, program edukasi keuangan perlu menjangkau masyarakat sejak pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi (isi materi, metoda dan cara penyampaian perlu disesuaikan dengan karakteristik dan tingkat kemajuan sasaran yang dituju).
- Untuk mempercepat proses edukasi, program edukasi perlu diprioritaskan kepada bagian masyarakat yang dianggap menjadi ‘tokoh’ (termasuk tokoh keagamaan) yang diharapkan bisa berpengaruh pada lingkungan sekitarnya.
- Sasaran program edukasi keuangan juga sebaiknya diarahkan pada kelompok wanita (ibu rumah tangga) yang jumlahnya hampir 50% dari populasi penduduk di Indonesia, dan secara kultural selama ini berperan penting sebagai pengatur keuangan keluarga. Edukasi yang efektif terhadap ibu rumah tangga juga akan menjadikan ibu rumah tangga bisa berperan sebagai edukator keuangan keluarga yang paling efektif bagi anggota keluarganya.

- Sasaran program edukasi keuangan juga bisa diarahkan pada kalangan usia produktif (generasi muda), masyarakat yang sudah bekerja dan berpenghasilan, para pensiunan, serta para pengusaha sebagai aktor penggerak utama perekonomian.

3. Bentuk dan metoda edukasi keuangan yang diterapkan

Pertanyaan berikutnya yang diajukan kepada para responden adalah “apa saja bentuk dan metoda edukasi keuangan yang bisa diterapkan di Indonesia?” Perspektif menarik yang diperoleh dalam proses wawancara dengan pejabat dekanat FEB UGM, sebagai berikut:

“Setahu saya...selama ini program edukasi keuangan sudah cukup banyak dilakukan oleh OJK dan BI. Biasanya mereka menggandeng lembaga keuangan dalam bentuk seminar atau penyuluhan. Sayangnya, kesibukan konsolidasi internal di OJK dan BI masih sangat menyita energi dan waktu mereka. Kalaupun menggandeng perguruan tinggi...faktanya...masih hanya melibatkan universitas besar saja misalnya dengan UI dan UGM.....Sudah saatnya OJK atau BI berkolaborasi dengan lebih intensif tidak saja dengan lembaga keuangan yang ada di Indonesia, tapi juga semua perguruan tinggi di seluruh Indonesia....Tentang bentuk dan metodenya saya kira....bisa bermacam-macam ya...misalnya ceramah edukasi keuangan yang diisi oleh OJK sebagai regulator, lembaga keuangan sebagai praktisi, dan akademisi dari perguruan tinggi. Yang pertama disasar adalah mahasiswa, lalu setelah mereka siap...ya merekalah nantinya yang akan menjadi tenaga penyuluh yang jangkauannya bisa sangat luas dan waktunya bisa lebih leluasa. Metodenya bisa saja misalnya disisipkan pada kegiatan KKN Tematik seperti yang kita punya di UGM...atau bentuk lainnya tergantung kesiapan di universitas masing-masing (wawancara dengan Bapak Edhie Pumawan, PhD).”

Disamping itu, sebagaimana juga ditampilkan dalam Lampiran 1, pola informasi yang diperoleh dari jawaban para responden terkait bentuk dan

metoda edukasi keuangan yang bisa dilakukan di Indonesia bisa disarikan sebagai berikut:

- Lomba, kuis, atau *games* produk dan jasa keuangan yang bisa diikuti secara terbuka oleh seluruh mahasiswa (baik FEB maupun non-FEB). Sebelum mengikuti lomba atau kuis tersebut, mahasiswa perlu diberikan pembekalan berupa ceramah dan modul atau materi tentang pengetahuan keuangan yang nantinya akan mempercepat proses edukasi keuangan.
- Bentuk edukasi keuangan perlu disesuaikan dengan karakteristik dari peserta yang disasar (misalnya tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, kebiasaan di tempat tinggal). Bentuk dan metoda penyampaian materi perlu dibuat dalam format sederhana, tapi tetap menarik dan aplikatif, misalnya bisa melalui media sosial, aplikasi *smartphone*, *website*, seminar edukasi keuangan; museum keuangan, lomba karya ilmiah, promosi *lifestyle* keuangan yang cerdas, edukasi dalam forum keagamaan (pengajian), edukasi melalui acara arisan keluarga ataupun program TV yang kreatif dan menarik.
- Bentuk dan metoda edukasi keuangan bisa dilakukan dengan cara pemberian ilustrasi tentang pengelolaan keuangan yang sederhana tapi menarik dan aplikatif. Bisa juga dalam bentuk penyuluhan, seminar, *games*, media komunikasi (*above* dan *below the line*).

4. Peran mahasiswa dalam program edukasi keuangan

Pertanyaan keempat yang diajukan kepada para narasumber adalah “bagaimana peran mahasiswa dalam program edukasi keuangan?” Pertanyaan ini menarik untuk diajukan kepada para narasumber karena berdasarkan hasil observasi dan diskusi penulis dengan kelompok-kelompok mahasiswa minat keuangan selama ini, beberapa mahasiswa FEB UGM telah berinisiatif membentuk kelompok yang secara aktif belajar bersama dan menyusun ide-ide

kreatif untuk mewujudkan idealisme mereka dalam bentuk kontribusi nyata bagi proses edukasi keuangan di Indonesia. Mereka memulai proses edukasi keuangan dari diri sendiri dan kelompok diskusi mereka, lalu menterjemahkan dan berbagi pengetahuan mereka dalam produk atau aktivitas kreatif yang nantinya diarahkan untuk mengedukasi rekan-rekan mereka atau masyarakat secara umum. Sebagai contoh, beberapa mahasiswa menyusun *blog* berisi tulisan sederhana dan menarik tentang bagaimana mengelola uang pribadi secara bijak. Mereka juga bergabung dengan mahasiswa dari fakultas non-FEB (misalnya informatika) yang pintar grafis dan program komputer untuk membuat video yang unik dan menarik maupun *games* aplikasi untuk *smartphone* yang kreatif tentang *money management*.

Dari proses wawancara yang dilakukan dengan berbagai narasumber, beberapa pola informasi yang diperoleh bisa disarikan sebagaimana dalam poin-poin berikut ini:

- Pelaksanaan program edukasi keuangan untuk kasus di UGM bisa dilakukan melalui kegiatan “Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik”. Program KKN sebagai ciri khas kampus UGM hingga saat ini masih aktif dilakukan oleh UGM, sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa yang mengikuti KKN tematik menyusun dan menjalankan program KKN sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari selama ini. Program edukasi keuangan sangat mungkin disisipkan sebagai salah satu program unggulan dalam kegiatan KKN Tematik yang diharapkan berdaya jangkau tidak saja hanya di pulau Jawa tapi juga di luar Jawa. Keunggulan lainnya adalah mahasiswa yang sedang KKN bisa lebih intensif dalam mengedukasi masyarakat karena mereka tinggal di rumah penduduk dan berinteraksi dengan masyarakat di lokasi KKN dalam waktu relatif panjang (sekitar 2 bulan).
- Untuk meningkatkan kesiapan mahasiswa dalam program edukasi keuangan, mahasiswa perlu dibekali modul dan materi-materi keuangan, lalu diberi pelatihan agar siap menjadi ‘penyuluh’ keuangan dengan jangkauan program yang lebih luas dan lebih intensif.
- Mahasiswa bisa berperan tidak saja sebagai penyuluh dalam program edukasi keuangan, tapi juga sebagai agen perubahan yang bisa memberikan contoh dan ide-ide sederhana tapi tetap kreatif dan menarik tentang pengelolaan uang yang bijak bagi rekan-rekannya di kampus maupun masyarakat secara umum.
- Mahasiswa perlu didukung oleh para akademisi dan pejabat kampus dalam bentuk pembekalan teori dan konsep serta dukungan lainnya. Disamping itu, program magang mahasiswa di berbagai lembaga keuangan juga diharapkan akan meningkatkan bekal pemahaman dan pengalaman mahasiswa dalam proses edukasi keuangan maupun inklusi keuangan.
- Semakin banyak mahasiswa yang bisa dilibatkan dalam kelompok minat keuangan di setiap perguruan tinggi yang bersifat *volunteer*, tidak saja di lingkungan FEB, tapi juga non-FEB sesuai dengan minat dan keahlian masing-masing yang bisa disinergikan pada topik edukasi keuangan (misalnya tentang “*citizen wealth management*”).
- Mahasiswa juga bisa menciptakan dan mencontohkan *lifestyle* bahwa cerdas keuangan adalah ‘keren’ yang diharapkan bisa berpengaruh positif untuk lingkungan rekan-rekan di kampus, maupun masyarakat secara umum.
- Membuat kampanye ‘produk keuangan halal’ untuk meluruskan pandangan sempit yang mungkin keliru di masyarakat. Untuk itu mahasiswa perlu didukung dan bekerjasama dengan regulator (BI/OJK), para praktisi keuangan, para akademisi, serta tokoh-tokoh keagamaan.
- Mahasiswa bisa berperan sebagai garda terdepan dalam program edukasi keuangan.

Mahasiswa sebagai motor penyuluhan bagi masyarakat (dimulai dari lingkungan terkecil: rekan di kampus, lingkungan kos-kosan, dan keluarga di kampung masing masing).

5. Bentuk dan sumber dukungan yang diharapkan

Pertanyaan lainnya yang juga diajukan kepada para narasumber adalah “bentuk dan sumber dukungan apa saja yang bisa diberikan kepada (diharapkan oleh) para mahasiswa untuk mendukung akselerasi program edukasi keuangan di Indonesia”. Intisari informasi yang bisa diperoleh dari proses wawancara bisa dijabarkan sebagaimana dalam poin-poin berikut ini:

- Dukungan utama yang perlu diberikan kepada para mahasiswa adalah pembekalan berupa materi (modul), ceramah, dan pendampingan oleh BI (OJK); para pelaku lembaga keuangan; serta para akademisi di kampus masing-masing untuk meningkatkan pengetahuan dan kesiapan mahasiswa untuk menjadi edukator terdepan dalam program edukasi keuangan.
- Dukungan dalam bentuk apapun yang bisa diberikan kepada para mahasiswa tentu saja akan lebih memotivasi mereka dalam proses edukasi keuangan di Indonesia. Dukungan dana memang penting, tapi kalau bisa bukan dana tunai langsung, tapi lebih dalam bentuk lainnya misalnya beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi dalam pelaksanaan program edukasi keuangan.
- Dukungan lainnya yang akan lebih memotivasi mahasiswa misalnya adalah dalam bentuk modul, seminar kit, ataupun sertifikat penghargaan yang ditandatangani pejabat BI (OJK) dan pejabat universitas untuk lebih memotivasi keterlibatan mahasiswa dalam program edukasi keuangan di Indonesia.
- Universitas perlu bekerjasama dengan pihak BI (OJK) untuk menyediakan pusat-pusat kegiatan edukasi keuangan (misal ‘rumah OJK’ di lingkungan kampus) sebagai tempat

untuk aktivitas diskusi, penyuluhan, pemberian piagam, tenaga ahli, dan lainnya.

- Sumber dukungan bisa berupa dukungan dana, modul edukasi, tenaga penyuluh dan tenaga pendamping ahli dari BI (OJK), Pemda, Rektorat, Dekanat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh keagamaan dan lembaga-lembaga keuangan baik dalam negeri dan luar negeri.
- Pihak BI (OJK) dan praktisi lembaga keuangan (bank, perusahaan sekuritas; lembaga pembiayaan, dan Bursa Efek) perlu mempermudah syarat dan setoran minimal pembuatan akun produk keuangan bagi kalangan mahasiswa untuk lebih mengenalkan produk-produk lembaga keuangan bagi kalangan mahasiswa, sekaligus menambah bekal pengetahuan dan pengalaman bagi mahasiswa dengan cara bersentuhan langsung dengan lembaga keuangan.

6. Evaluasi dan tindak lanjut atas proses dan hasil program edukasi keuangan

Pertanyaan terakhir yang diajukan adalah “bagaimana melakukan evaluasi dan tindak lanjut atas proses dan hasil program edukasi keuangan di Indonesia?” Pertanyaan ini sangat relevan untuk ditanyakan karena proses edukasi keuangan di Indonesia selama ini belum terlihat jelas bentuk idealnya, dan masih dilakukan secara insidental dan sporadis, dengan jangkauan yang sebagian hanya menjangkau daerah pulau Jawa dan beberapa kota besar lainnya.

Sebuah program kegiatan diharapkan bisa berhasil jika dalam prosesnya maupun setelah mencapai hasil selalu dievaluasi, dan atas dasar hasil evaluasi dilakukan tindak lanjut untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi. Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber penelitian ini, informasi yang diperoleh bisa disarikan sebagai berikut:

- Evaluasi perlu dilakukan oleh semua pihak yang terlibat (BI, OJK, lembaga keuangan, pejabat universitas, perwakilan mahasiswa, maupun tokoh-tokoh masyarakat) secara

ruitin (misalnya 6 bulan sekali) dalam bentuk diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*) untuk mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan dari program edukasi yang sudah berjalan, dan mencari alternatif tindak lanjut untuk memperbaiki proses tersebut.

- Perguruan tinggi bekerjasama dengan BI (OJK) dan lembaga keuangan perlu melakukan kajian-kajian ilmiah (survey dan riset berkala) untuk mengevaluasi dan memperbaiki program edukasi keuangan yang telah dilakukan.
- Pihak-pihak yang terlibat dalam program edukasi keuangan di Indonesia perlu duduk bersama dan menyusun *action plan* yang terstruktur dan sistematis.
- Perlu dilakukan pemantauan dan pendampingan para mahasiswa yang menjadi *volunteer* program edukasi keuangan dan para peserta program sejak dari tahap awal hingga mandiri.
- Perlu dilakukan tindakan *cross-check* pada setiap tahap kegiatan edukasi keuangan yang telah dilakukan. Evaluasi secara berkala (misal 6 bulan sekali) dan melakukan perbaikan setelah proses evaluasi.

Diskusi hasil penelitian

Dua pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini pada dasarnya ditujukan untuk menjawab isu utama, yaitu:

- (1) seberapa siapkah mahasiswa di Indonesia untuk “dipoles” atau dididik lebih lanjut sebagai tenaga *volunteer* dalam akselerasi program edukasi keuangan di Indonesia (diukur dari tingkat literasi keuangan mahasiswa di Indonesia - dengan mengambil sampel pada mahasiswa UGM);
- (2) apa sajakah yang perlu disiapkan jika program edukasi keuangan di Indonesia akan dipercepat (akselerasi) dengan melibatkan tidak saja pihak regulator (BI/OJK); pihak praktisi (lembaga

keuangan); pihak akademisi (universitas); tapi juga mahasiswa pada universitas di seluruh Indonesia sebagai sumber daya yang tidak saja sangat banyak dalam hal kuantitas, tapi secara kualitas sudah memasuki jenjang pendidikan yang paling tinggi dan siap untuk dididik menjadi garda edukator terdepan.

Hasil pengujian yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan survey terhadap 348 responden mahasiswa di lima fakultas di lingkungan UGM menyimpulkan bahwa tingkat literasi keuangan mahasiswa UGM yang diukur dari nilai rata-rata jawaban yang benar dari para responden adalah 45,39% dengan nilai median sebesar 46,25%. Hasil temuan ini memang relatif lebih kecil dibanding temuan penelitian serupa yang pernah dilakukan di Amerika oleh Chen and Volpe (1998) yang menemukan bahwa skor rata-rata literasi keuangan responden sebesar 52,87%, dan nilai median 55,56%, ataupun hasil temuan Beal and Delpachitra (2003) di Australia, yang menemukan bahwa skor literasi keuangan di Australia sebesar 53%.

Terlepas dari kemungkinan perbedaan metodologi pengukuran tingkat literasi yang digunakan, hasil temuan penelitian ini relatif lebih baik jika dibandingkan dengan temuan survei nasional literasi keuangan yang dilakukan OJK (2013) – dalam Kompas (2014) di 20 provinsi dengan 8.000 responden, yang menemukan secara umum tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia baru mencapai tingkat 21,8%. Secara umum perbandingan hasil temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat literasi keuangan mahasiswa relatif lebih baik dibanding tingkat literasi keuangan masyarakat umum.

Hasil ini juga bisa diartikan sebagai peluang bagi Bank Indonesia (OJK) untuk mempercepat proses edukasi keuangan di Indonesia dengan cara berkolaborasi tidak saja dengan lembaga-lembaga keuangan (seperti yang banyak dilakukan selama ini), tapi juga dengan perguruan tinggi di Indonesia. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan caramenyeleksi dan mengedukasi para mahasiswa agar tingkat

literasi keuangan mereka meningkat dan siap untuk diterjunkan menjadi tenaga edukator keuangan dalam kuantitas yang masif, serta mampu menjangkau lokasi yang lebih luas dan menyebar di seluruh wilayah di Indonesia.

Hasil temuan yang diperoleh dengan pendekatan kedua (pendekatan kualitatif) menyimpulkan bahwa para narasumber yang diwawancarai cenderung bersikap positif tentang arti penting dan manfaat program edukasi keuangan di Indonesia. Melalui program edukasi keuangan, masyarakat Indonesia akan menjadi semakin cerdas dan bijak dalam memahami dan mengelola keuangan pribadi mereka, sehingga pertumbuhan dan sekaligus pemerataan perekonomian di Indonesia bisa ditingkatkan. Disamping itu, jika tingkat literasi keuangan masyarakat meningkat, diharapkan tingkat inklusi keuangan di Indonesia dalam bentuk interaksi dan utilisasi produk dan jasa keuangan juga akan semakin meningkat, yang selanjutnya diharapkan memperluas kesempatan masyarakat untuk melakukan kegiatan simpanan, pinjaman, asuransi, ataupun aktivitas investasi. Disamping itu, program edukasi keuangan diharapkan membuat masyarakat semakin cerdas dan kritis sehingga bisa menghindarkan mereka dari jerat penipuan investasi 'bodong' yang selama ini tidak saja menimbulkan kerugian moneter tapi juga sering menimbulkan potensi keresahan masyarakat.

Temuan lainnya yang bisa diperoleh dari pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah bahwa program edukasi keuangan perlu diarahkan pada seluruh komponen masyarakat, baik dari tingkat pendidikan (pendidikan dini hingga universitas), maupun dari sisi geografis (desa maupun kota). Untuk mempercepat proses tersebut, kolaborasi yang solid perlu dilakukan antara tiga pihak utama: (1) BI/OJK sebagai pihak regulator; (2) lembaga-lembaga keuangan (praktisi dan penyedia produk keuangan); dan (3) akademisi (perguruan tinggi). Kolaborasi dari ketiga kekuatan utama tersebut diharapkan bisa mempercepat (mengakselerasi) program edukasi keuangan di Indonesia. Sebagai kekuatan

terdepan dalam akselerasi program edukasi keuangan di Indonesia, mahasiswa adalah sumber daya yang tersedia dalam kuantitas yang sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Mahasiswa perlu didukung oleh ketiga komponen utama tersebut, dengan cara dididik dan didampingi dalam kegiatan yang bersifat sukarela (*voluntary activities*).

Dalam akselerasi program edukasi keuangan tersebut, mahasiswa dengan kreativitasnya masing-masing perlu dimotivasi dan didampingi untuk menuangkan ide-ide kreatif mereka dan menyusun serta menjalankan aktivitas-aktivitas edukasi keuangan yang sederhana tapi tetap menarik, kreatif dan aplikatif. Untuk menjamin keberhasilan akselerasi program edukasi keuangan, proses evaluasi dan tindak lanjut sangat perlu dilakukan secara berkala dan melibatkan semua pihak untuk mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan selama dan setelah proses edukasi keuangan, dan selanjutnya melakukan tindak lanjut perbaikan yang perlu dilakukan.

Berdasarkan hasil temuan penelitian ini, bisa disimpulkan bahwa mengingat arti penting dan manfaat program edukasi keuangan di Indonesia, perlu kiranya dilakukan percepatan (akselerasi) program edukasi keuangan dengan melibatkan tiga aktor utama (BI/OJK sebagai regulator; lembaga keuangan sebagai praktisi; dan perguruan tinggi mewakili akademisi) dan sebagai ujung tombak pelaksanaannya adalah para mahasiswa yang tersedia sebagai sumber daya dalam jumlah masif dan bisa menjangkau sebaran geografis dan luas dan tersebar di seluruh Indonesia.

Manfaat lainnya dari pembekalan terhadap para mahasiswa terpilih dalam program edukasi keuangan di Indonesia adalah akan diperolehnya generasi muda (mahasiswa) yang mempunyai tingkat literasi keuangan yang baik, yang tidak saja bisa diberdayakan sebagai tenaga edukator keuangan, tapi juga selanjutnya siap untuk diasah lebih lanjut menjadi tenaga profesional di bidang keuangan yang nantinya bisa menjawab ketimpangan antara kebutuhan atas sumber daya

manusia yang cakap di bidang keuangan yang terus meningkat, sementara ketersediaannya tidak mampu mengimbangi pertumbuhan permintaan.

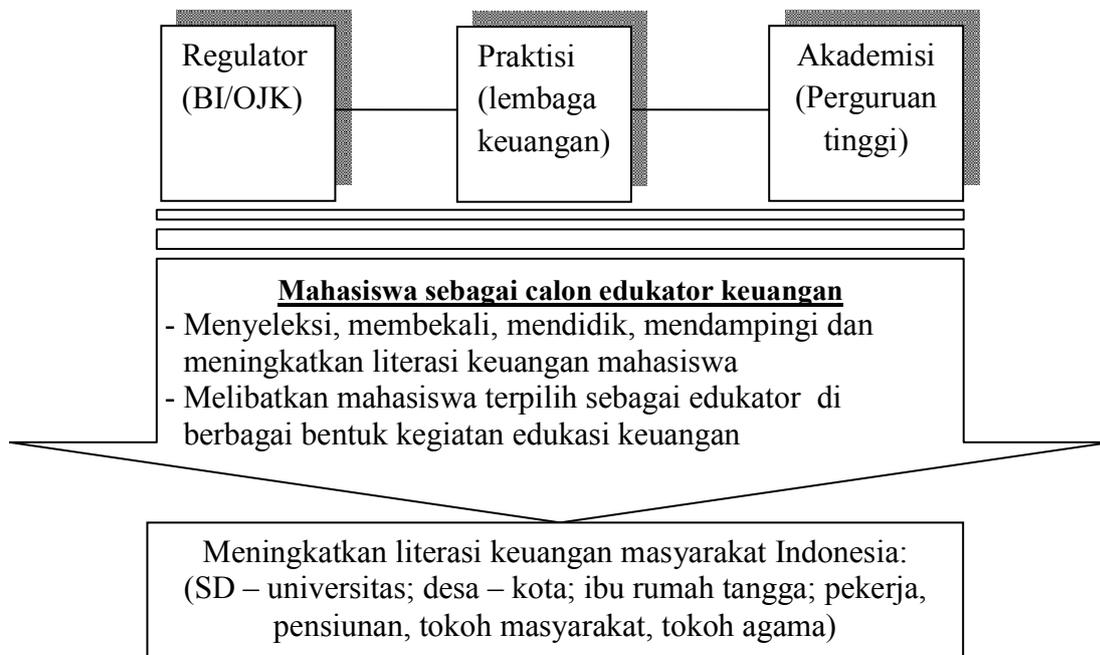
Jika dilihat dari ketersediaan sumber daya manusia (mahasiswa) yang ada di perguruan tinggi di Indonesia, ide akselerasi program edukasi keuangan melalui kolaborasi BI (OJK); lembaga keuangan; dan perguruan tinggi sangat mungkin bisa dilakukan dengan jangkauan program yang lebih luas. Sebagai gambaran, untuk kasus di UGM saja hingga tahun ajaran 2013/2014 terdaftar 51.796 mahasiswa aktif dan 2.414 dosen. Untuk Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM jumlah mahasiswa yang terdaftar sekitar 5.000-an orang (S-1; S-2 dan S-3) dengan tenaga akademisi yang berjumlah 204 dosen. Sementara secara nasional, berdasarkan data Dikti (2014), saat ini jumlah perguruan tinggi yang terdaftar dan beroperasi di Indonesia mencapai 142 perguruan tinggi negeri (universitas, sekolah tinggi, akademi, politeknik); dan 3.078 perguruan tinggi swasta (PTS), serta total mahasiswa berjumlah mahasiswa sekitar 5 juta orang dan

tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu terdapat juga 52 perguruan tinggi agama Islam negeri (PTAIN) dan 272 perguruan tinggi agama Islam swasta (PTAIS) di Indonesia. Seandainya dalam program edukasi keuangan bisa menyeleksi dan mempersiapkan 5% saja dari populasi mahasiswa di seluruh Indonesia, maka akan diperoleh setidaknya 250.000 orang mahasiswa yang siap diberdayakan sebagai tenaga edukator keuangan yang enerjik, memiliki fleksibilitas waktu lebih baik, dan daya jangkau wilayah dan sasaran yang lebih luas. Sebagai akhir kata, secara garis besar ide akselerasi program edukasi keuangan di Indonesia melalui kolaborasi antara Bank Indonesia (OJK), lembaga keuangan, dan perguruan tinggi bisa diilustrasikan dalam gambar 2 di bawah ini.

SIMPULAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara terhadap para narasumber yang dianggap mewakili memahami program edukasi keuangan di Indonesia (24 orang narasumber

Gambar 3. Kerangka berpikir akselerasi program edukasi keuangan melalui kolaborasi antara Bank Indonesia (OJK), lembaga keuangan, dan perguruan tinggi



yang mewakili kelompok: pejabat dekanat; dosen jurusan manajemen minat keuangan; mahasiswa FEB minat keuangan; mahasiswa FEB minat non-keuangan; dan praktisi lembaga keuangan). Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara terhadap para narasumber dalam penelitian ini diarahkan pada pendapat (persepsi) para narasumber atas beberapa hal yang terkait dengan program edukasi keuangan di Indonesia seperti: (1) arti penting dan manfaat dilakukannya edukasi keuangan di Indonesia; (2) siapa saja yang perlu disasar oleh program edukasi keuangan; (3) bentuk dan metoda edukasi keuangan yang diterapkan; (4) peran mahasiswa dalam program edukasi keuangan; (5) bentuk dan sumber dukungan yang diharapkan para mahasiswa dalam program edukasi keuangan; (6) evaluasi dan tindak lanjut atas proses dan hasil program edukasi keuangan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa para narasumber yang diwawancarai menunjukkan persepsi positif tentang arti penting dan manfaat program edukasi keuangan di Indonesia. Temuan lainnya adalah bahwa program edukasi keuangan perlu diarahkan pada seluruh komponen masyarakat dengan jangkauan yang lebih luas. Untuk mempercepat proses tersebut, kolaborasi yang solid perlu dilakukan antara tiga pihak utama: (1) BI/OJK sebagai pihak regulator; (2) lembaga-lembaga keuangan (praktisi dan penyedia produk dan jasa keuangan); dan (3) akademisi (perguruan tinggi). Kolaborasi dari ketiga kekuatan utama tersebut diharapkan bisa mempercepat (mengakselerasi) program edukasi keuangan di Indonesia. Mahasiswa bisa dijadikan kekuatan terdepan dalam akselerasi program edukasi keuangan di Indonesia, mengingat mahasiswa adalah sumber daya yang tersedia dalam kuantitas yang sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

SARAN YANG DIREKOMENDASIKAN

Tulisan ini bertujuan untuk melakukan kajian atas kemungkinan akselerasi program edukasi keuangan di Indonesia yang selama ini dirasa belum maksimal dan belum menjangkau

komponen masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Mengingat arti penting dan manfaat positif dari program edukasi keuangan, perlu kiranya dipikirkan cara untuk mempercepat (akselerasi) program edukasi keuangan di Indonesia.

Ide dasar dari penulisan makalah ini adalah bahwa untuk mengakselerasi program edukasi keuangan di Indonesia, perlu dilakukan kolaborasi antara tiga aktor utama, yaitu: pihak regulator (BI/OJK); pihak praktisi (lembaga keuangan); dan pihak akademisi (perguruan tinggi). Kolaborasi antara ketiga komponen utama tersebut sebaiknya diarahkan kepada mahasiswa yang diasumsikan sudah menjalani jenjang pendidikan tertinggi, lalu diseleksi, dididik dan didampingi sehingga siap menjadi para sukarelawan yang enerjik, kreatif dan sekaligus menjadi agen perubahan dan model peran (*role model*) tidak saja bagi lingkungan rekan-rekan mereka di kampus, tapi juga pada jangkauan yang lebih mengena yaitu pada masyarakat di sekitar tempat tinggal (asrama/kos-kosan), lingkungan keluarga di kampung halaman, maupun lingkungan masyarakat dimana mahasiswa terlibat dalam program edukasi keuangan.

Sebagai bagian akhir dari tulisan ini, beberapa rekomendasi yang bisa diberikan adalah sebagai berikut:

- Mahasiswa merupakan bagian dari komponen masyarakat yang memperoleh kesempatan mengenyam tingkat pendidikan tertinggi. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa mahasiswa (sampel mahasiswa UGM) cenderung mempunyai tingkat literasi keuangan yang relatif cukup tinggi dibanding masyarakat umum (hasil survey OJK tahun 2013 – dalam Kompas, 2014). Sumber daya mahasiswa yang tersedia dalam kuantitas sangat banyak dan tersebar di Indonesia bisa diberdayakan sebagai tenaga edukator keuangan.
- Perlu dilakukan pelatihan, pendampingan, dan pemotivasian bagi para mahasiswa dengan kolaborasi yang solid antara tiga kekuatan utama: (1) BI/OJK sebagai pihak regulator; (2) lembaga-lembaga keuangan

- (praktisi dan penyedia produk dan jasa keuangan); dan (3) akademisi (perguruan tinggi).
- Program edukasi keuangan perlu didesain dan direncanakan dengan baik dan disesuaikan dengan karakteristik dari sasaran edukasi yang akan dituju. Materi yang disampaikan perlu dibuat sederhana dan kreatif, menarik dan aplikatif.
 - Untuk menjamin keberhasilan akselerasi program edukasi keuangan, proses evaluasi dan tindak lanjut sangat perlu dilakukan secara berkala dan melibatkan semua pihak untuk mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan selama dan setelah proses edukasi keuangan, dan selanjutnya melakukan tindak lanjut perbaikan yang perlu dilakukan.
-

DAFTAR PUSTAKA

- ACNielsen Research (2005). ANZ Survey of Adult Financial Literacy in Australia. *Final Research Report*, Melbourne.
- Al-Tamimi, HH., dan Kalli, AB. (2009). Financial literacy and investment decisions of UAE investors. *The Journal of Risk Finance* 10; 500-516.
- Apostoaie, M.C. (2010). Central Bank's involvement in encouraging economic education and literacy. *Economics and Applied Informatics*, 26: 147-154.
- Beal, D. dan Delpachitra, S. (2003). Financial literacy among Australian university students. *Economic Papers* 22: 65-78.
- Bialaszewski, D., Pencek, T., dan Zietlow, J. (1993). Finance requirements and computer utilization at AACSB accredited schools. *Financial Practice and Education*: 133-139.
- Bönte, W. dan Filipiak, U. (2012). Financial literacy, information flows, and caste affiliation: *Empirical evidence from India*. *Journal of Banking & Finance* 36: 3399-3414.
- Chen, H. dan Volpe, R. (1998). An analysis of personal financial literacy among college students. *Financial Services Review* 7: 107-128.
- Danes, SM., dan Hira, TK. (1987). Money management knowledge of college students. *The Journal of Student Financial Aid* 17: 4-16.
- Dikti. 2014. Daftar Perguruan Tinggi. Diakses dari: <http://www.dikti.go.id/id/direktori-pt/daftar-perguruan-tinggi-negeri/>
- Emory, D.R., Schindler, P.S. (2011). *Business research methods*. 11th edition. McGraw Hill, International edition.
- Fluch, M. (2007). Selected central bank's economic and financial literacy programs. *Monetary Policy and the Economy*: 85-104.
- Gnan, E., Silgoner, M. A. dan Weber, B. (2007). Economic and Financial Education: Concepts, Goals and Measurement. *Monetary Policy & the Economy*: 28-49.
- Kompas (2014). Literasi keuangan: Ibu jadi pilar. Edisi 11 Agustus: 17.
- Marriott, P. (2007). An analysis of first experience students' financial awareness and attitude to debt in a post-1992 UK University. *Higher Education Quarterly* 61: 498-519.
- OECD (2005). Improving Financial Literacy: Analysis of issues and policies. *OECD Research report* 85: 108-129.
- OECD (2012). Measuring Financial Literacy: Results of the OECD/International Network on Financial Education (INFE) Pilot Study, *OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions* 15, OECD Publishing.
- OJK (2013). Annual Report 2013: Towards integrated financial industry supervision. 1-216.

- Remund DL. (2010). Financial literacy explicated: The case for a clearer definition in an increasingly complex economy. *Journal of Consumer Affairs* 44: 276–295.
- Rosacker, KM, Ragothaman, S., dan Gillispie, M. (2009). Financial literacy of freshmen business school students. *College Student Journal* 43: 391-399.
- Slavin, R.E. (2012). *Educational Psychology: Theory and Practice*. 10th-ed, Pearson Learning, New York.
- Williams T. (2007). Empowerment of whom and for what? Financial literacy education and the new regulation of consumer financial services. *Law & Policy* 29: 226–256.
- Wooldridge, J.M. (2010). *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data*. 2nd edition, MIT Press, London.
- World Bank (2010). Improving access to financial services in Indonesia. *Research report: 1-202*.
- Xu, L dan Zia B. (2012). Financial literacy around the world: An overview of the evidence with practical suggestions for the way forward. The World Bank policy working paper. Diakses dari <http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813-9450-6107>